



# Memberikan Hak kepada Pejalan Kaki

- Belum Bisa Terpenuhi jika Jalur Pedestrian Tidak Layak
- Di Jogjakarta Relatif Lebih Baik Dibandingkan Kota Besar Lainnya



22 Januari diperingati sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Didedikasikan untuk para pejalan kaki dengan hak-haknya di jalan raya sekaligus mengenang peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan delapan pejalan kaki di kawasan Tugu Tani, Jakarta pada 22 Januari 2012 silam - *Baca Memberikan... Hal 7*



GUNTUR AGA TRITANA/RADAR JOGJA  
**MELANGGAR ATURAN:** Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki dipakai meletakkan meja dan kursi sebuah warung makan hingga alat peraga kampanye calon legislatif di Jalan Magelang, kemarin (21/1).

# Memberikan Hak kepada Pejalan Kaki

Sambungan dari hal 1

**JOGJA** - Jalur pedestrian dinilai penting untuk dalam pembangunan suatu wilayah. Terlebih bagi kota dengan jumlah penduduk yang padat. Di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), khususnya Kota Jogja telah mempunyai beberapa jalur pedestrian untuk memberikan rasa nyaman bagi pejalan kaki.

"Dalam tulisan di buku saya, kita harus merekognisi atau memberikan hak kepada pejalan kaki di kota-kota seluruh Indonesia. Banyak jalan raya atau jalan transportasi kendaraan tetapi tidak dilengkapi dengan jalur pedestrian," ujar Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Bambang Hidayana kepada *Radar Jogja*, kemarin (21/1).

Jalur pedestrian dulu sering disebut dengan trotoar. Faktanya trotoar malah sering dipakai berjualan oleh pedagang kaki lima. Fenomena di Jogjakarta, jalur pedestrian kalau tidak dijaga atau diawasi dengan baik biasanya dipakai untuk berjualan. "Para pedagang itu sering kali begitu. Terutama ketika malam hari. Bahkan di sekitar UGM pun juga begitu. Seperti di depan Fakultas Geografi, jalur pedestrian sudah dilebarkan tetapi masih ada saja pedagang yang berjualan," tuturnya.

Walaupun begitu, dia menilai jalur pedestrian di Kota Jogja relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kota besar lainnya. Jalur tersebut dinilai penting untuk mengurangi kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di jalan. "Padahal dengan jalan kaki, orang bisa lebih menikmati kota.

Tentunya juga akan lebih sehat," jelasnya.

Hak pejalan kaki tersebut belum bisa terpenuhi jika jalur pedestrian tidak layak. Di Jogjakarta sangat marak pembangunan jalanan atau gedung di perkotaan. Karena itu jalur pedestrian itu harus diperbaiki. Dia menyebutkan sejumlah kawasan yang sudah diperbaiki seperti di depan RS Bethesda. "Sehingga pejalan kaki bisa menikmati," tandasnya.

Namun, fenomena yang terjadi ketika jalannya macet, para pengguna motor sering menerabas trotoar dan mengganggu pejalan kaki. Hal tersebut menjadi kephatitan bagi aktivis dan pemerhati transportasi perkotaan. "Jangan sampai para pejalan kaki merasa terancam walau sudah di jalur pedestrian," tuturnya.

Gerakan sosial untuk menanggapi hal tersebut kemudian muncul di beberapa kota seperti Koalisi Pejalan Kaki (KoPeKa). Aktivis itu mulai mengadakan aksi dengan blokade jalan dengan cara tidur di ujung jalur pedestrian. Perilaku pengguna jalan yang rusuh tersebut menjadi sangat "biadab".

Karena mereka yang punya kekuasaan cenderung menguasai (jalur pedestrian) seandainya sehingga mengorbankan orang lain (pejalan kaki). "Itu juga untuk pembelajaran. Jadi pihak terkait seperti Satpol PP ataupun komunitas untuk lebih aktif melakukan penertiban," imbuhnya.

Selain itu, banyak jalur pedestrian yang dipadati dengan papan iklan ataupun papan nama. Hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan pejalan kaki dan mengganggu pemandangan lay out kota. "Apalagi saat musim pemilu, pasti akan

## INSIGHT

bertambah lagi banner atau poster yang banyak terpasang di jalur pedestrian," ujarnya.

Idealnya, jalur pedestrian harus memenuhi beberapa syarat. Ketua Pustral UGM Ir Ika putra menyampaikan, standar jalur pejalan kaki yang pertama harus lebar, artinya bisa untuk berpasangan dua orang. Adanya tempat transit juga diperlukan, karena para pejalan kaki juga bisa istirahat di tempat tersebut. "Selain itu, bisa juga untuk duduk menikmati taman kota," ujarnya.

Kualitas saat membuat sebuah pedestrian juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena biar terlihat bagus malah dipasang dengan keramik. "Kalau keramik itu malah bikin licin, saya melihat di beberapa kota seperti itu," tandasnya.

Keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki perlu diberi fasilitas seperti lampu jalan bahkan pemasangan WiFi. Fasilitas tempat untuk naik kendaraan umum juga diperlukan. "Mereka bisa mencari kendaraan dengan mudah karena tidak perlu jalan berkilo-kilo baru dapat angkutan umum," jelasnya.

Ika putra juga menyebutkan, sejarah jalur pedestrian di Malioboro. Pada zaman penjajahan Belanda, jalur tersebut sangat lebar. Terdapat perubahan saat zaman Orde Baru yaitu pelebaran Jalan Malioboro sehingga berpotensi mempersempit jalur pedestrian. Hal itu lalu digarap sedemikian rupa oleh Romo Manguwijaya bersama tim UGM agar jalur pedestrian tetap bisa nyaman digunakan. "Jadi dulu (mengalinya) dengan cara melobangi lan-

tai satu untuk membuat *arcade*. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan jalur pedestrian agar tetap nyaman," tandasnya.

Sebagai informasi, jalur pedestrian Malioboro merupakan tempat pertama kalinya penempatan ubin pengarah untuk tunanetra di Indonesia. Hal tersebut terjadi pada 1997, dana pembangunannya pun dulu berasal dari iuran personal karena tidak ada proyek dari pemerintah sama sekali. "Untuk beli pencetak (ubin pengarah) itu harus iuran dengan kepala PU dan beberapa temen. Waktu itu cetakannya seharga sekitar Rp 200 ribu. Patunganya Rp 75 ribu ditanggung empat orang," ujarnya.

Seiring perkembangan zaman, kemudian hal tersebut diadopsi oleh kota-kota besar lainnya seperti Jakarta. Artinya, jalur pedestrian di Malioboro menjadi salah satu pemantik jalur pedestrian di seluruh Indonesia. "Kita punya sejarah yang menarik yaitu menjadi sumbangsih perihal jalur pedestrian dari Jogjakarta untuk Indonesia," tandasnya.

Tahun lalu, pihaknya mengaku diikuti sertakan membantu Pemerintah Kota Jogja dalam merencanakan pembuatan city walk di Jalan Simanuntak dan Jalan Herman Yohanes. Jalur pedestrian dinilai bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pejalan kaki lebih berpotensi untuk membeli produk yang di jual disekitar kawasan jalur pedestrian, hanya saja perlu ada pengaturan bagi para pedagang agar tidak mengganggu jalur tersebut. "Rencana sudah dilaksanakan, hanya tinggal menunggu eksekusinya," imbuhnya. (cr5/din/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**IG. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005